

GANTI KERUGIAN DAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Kasus Pada Pembangunan Istana Olahraga dan Stadion *Aquatic* di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura)

Oleh

Rhenaldho Nen Yunani,¹ Sudjito²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai ganti kerugian dan sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Istana Olahraga dan Stadion *Aquatic* di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, faktor penyebab yang menimbulkan sengketa tersebut dan penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Pengadilan maupun pemimpin masyarakat adat terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan melakukan penelitian lapangan dengan proses wawancara secara langsung dengan responden dan narasumber. Penelitian ini berlokasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk ganti kerugian dan sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Istana Olahraga dan Stadion *Aquatic* yaitu: Bentuk ganti kerugian diterima Kepala Suku Ohee dalam bentuk uang dan terjadi sengketa tuntutan ganti kerugian oleh beberapa suku terhadap tanah yang sama. (2) Faktor penyebab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Istana Olahraga dan Stadion *Aquatic* yaitu ganti kerugian awalnya tidak didasari pada musyawarah dengan masyarakat adat setempat, terjadi beberapa permasalahan terhadap tanah tersebut seperti pemalsuan dan dugaan penggelapan, adanya perbedaan pemahaman masyarakat adat, kurang jelasnya batas-batas tanah dan sulitnya menentukan siapa pemilik tanah ulayat sesungguhnya. (3) Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara pihak dari Pemerintah Daerah dan Kepala Suku terkait yang menghasilkan pemberhentian tindakan pemalangan dan rencana pembahasan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian setelah selesainya acara PON XX 2020.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Sengketa Pertanahan

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

COMPENSATION AND DISPUTE OF LAND ACQUISITION (Case Study on the Construction of the Sports Palace and Aquatic Stadium in Jayapura Regency)

By: Rhenaldho Nen Yunani,³ Sudjito⁴

ABSTRACT

The aims of this study is to find out about compensation and disputes in the acquisition of land for the construction of the Sports Palace and Aquatic Stadium in Jayapura Regency, the causal factors that cause the disputes and the settlement carried out by the Land Office, Regional Government, Courts and the leaders of indigenous community,

The method of this research is an empirical juridical research. This research was conducted by examining library materials and conducting field research by interviewing directly with respondents and informant. This research is located in the Regional Office of the Papua Province National Land Agency. The collected data were analyzed using qualitative methods

The results of the study shows that: (1) Forms of compensation and disputes in the acquisition of land for the construction of the Sports Palace and Aquatic Stadium, namely: The form of compensation received by the Chief of the Ohee Tribe in the form of money and disputes over claims for compensation by several tribes on the same land. (2) The causal factor in land acquisition for the construction of the Sports Palace and Aquatic Stadium is that the initial compensation was not based on consultation with the local indigenous community, there were several problems with the land such as counterfeiting and alleged embezzlement, differences in understanding of indigenous peoples, lack of clear boundaries land boundaries and the difficulty of determining who owns the customary land. (3) Settlement of the problem is carried out by mutual consultation between the parties of the Regional Government and the relevant Tribal Chief which results in the termination of the scandalous act and a plan to discuss the form and / or amount of compensation after the completion of the XX 2020 PON event.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Land Dispute

³ Postgraduate Student at Master Program of Notary Faculty of Law,, Gadjah Mada University.

⁴ Lecture at Master Program of Notary Faculty of Law, Gadjah Mada University.